

**ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM  
MENINGKATAN CAPAIAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KOTA  
SEMARANG**

**Dwita Puspa Arsella, Kismartini**

**Program Studi S1 Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

**Jalan Prof Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269**

**Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405**

**Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

---

**ABSTRACT**

*Digital transformation in the public service sector is a strategic step in increasing efficiency, transparency, and ease of access to services for the community. Identitas Kependudukan Digital (IKD) is present as a population administration innovation that aims to make it easier for the public to access public services digitally without relying on physical documents. However, the achievement of IKD activation in Semarang City is still far from the national target set, which is 30%. This study aims to analyze internal and external factors that influence the low achievement of IKD and formulate appropriate improvement strategies based on a strategic management approach. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, policy documentation, and literature studies. The strategy analysis was carried out using the SWOT analysis approach and litmus test and is based on the strategic planning theory according to Bryson (1995) which emphasizes the importance of a systematic approach by public organizations to help them respond effectively to internal and external challenges through the identification of strategic issues and clear, goal-based decision making. The results of the study indicate that internal factors include limitations in digital infrastructure, internal coordination, and quality of human resources, while external factors include community resistance, concerns about data leaks, and suboptimal cross-sector synergy. This study recommends a strategy based on collaboration, policy advocacy, increasing digital literacy, and digitalization of public services to encourage acceleration of IKD achievement.*

**Keywords:** *Identitas Kependudukan Digital, strategic planning, public services, Population and Civil Registration Service.*

**ABSTRAK**

Transformasi digital di sektor pelayanan publik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Identitas Kependudukan Digital (IKD) hadir sebagai inovasi administrasi kependudukan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik secara digital tanpa bergantung pada dokumen fisik. Namun, capaian aktivasi IKD di Kota Semarang masih jauh dari target nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 30%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi rendahnya capaian IKD serta merumuskan strategi peningkatan yang sesuai berdasarkan pendekatan manajemen strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi kebijakan, dan studi literatur. Analisis strategi dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan uji litmus serta didasarkan pada teori perencanaan strategis menurut Bryson (1995) yang menekankan pentingnya pendekatan sistematis oleh

organisasi publik untuk membantu mereka merespons tantangan internal dan eksternal secara efektif melalui identifikasi isu-isu strategis dan pengambilan keputusan berbasis tujuan yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal mencakup keterbatasan infrastruktur digital, koordinasi internal, dan kualitas SDM sedangkan faktor eksternal mencakup resistensi masyarakat, kekhawatiran terhadap kebocoran data, serta belum optimalnya sinergi lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan strategi berbasis kolaborasi, advokasi kebijakan, peningkatan literasi digital, dan digitalisasi pelayanan publik untuk mendorong percepatan capaian IKD.

**Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital, perencanaan strategis, pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan umum menjadi hak dasar setiap warga negara yang harus diciptakan. Hal ini menyangkut kondisi sosial suatu negara sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, salah satunya dalam pelaksanaan pelayanan publik yang prima.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 bahwa sistem administrasi kependudukan dirancang untuk menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan administrasi suatu negara dengan fokus utama pada pemberian hak-hak administratif sebagai kebutuhan dasar, pemberian layanan publik, serta perlindungan terhadap dokumen kependudukan.

Namun, kondisi pelayanan administrasi kependudukan dinilai masih belum optimal. Berdasarkan tabel 1, menunjukkan laporan terkait administrasi kependudukan menempati lima posisi teratas dengan total pelapor sebanyak 374 laporan. Masalah ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan layanan publik.

**Gambar 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Isi Laporan**

Substansi	2024	Grand Total
Kepegawaian	947	947
Agraria (Pertanahan dan Tata Ruang)	818	818
Perhubungan dan Infrastruktur	448	448
Hak Sipil dan Politik	394	394
Administrasi Kependudukan	374	374
Pendidikan	329	329
Kepolisian	317	317
Perdesaan	233	233
Kesehatan	193	193
Kesejahteraan Sosial	166	166

Sumber: Ombudsman RI, 2024

*E-government* hadir sebagai inisiatif untuk membenahi kualitas pelayanan. Melalui transformasi digital, pemerintah pusat menghadirkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 14 Permendagri No. 72 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa IKD bertujuan untuk meningkatkan penggunaan data kependudukan secara digital oleh masyarakat.

Upaya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik berperan penting dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs).

**Gambar 2. 17 Poin Tujuan SDGs**



Sumber: Bappenas.go.id

IKD berperan dalam mendorong pencapaian beberapa tujuan SDGs poin ke-10 untuk membantu menjamin masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik dan sosial yang merata, poin ke-16 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik, serta pemantauan demografi dan perencanaan kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial sesuai poin ke-9.

Meski diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan data kependudukan, kehadiran IKD masih mendapat *feedback* kurang baik dari masyarakat.

### Gambar 3. Kritik Masyarakat melalui Sosial Media



Sumber: Media sosial, 2024

Permasalahan terkait digitalisasi identitas kependudukan tidak hanya berhenti pada belum optimalnya aplikasi IKD dan belum adanya kebijakan privasi yang menjamin keamanan data. Sinergitas antar sektor juga menjadi permasalahan yang dirasakan masyarakat. Hambatan signifikan tersebut mempengaruhi masyarakat di beberapa daerah mengadopsi IKD dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satunya di Kota Semarang. Dilansir dari data Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, jumlah capaian IKD di Kota Semarang sendiri sebesar 5.09% per November tahun 2024 dan menempati peringkat ke-19 dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Kemendagri dalam Permendagri No. 72 Tahun 2022 yakni sebesar 30% dari jumlah perekaman.

Tabel 1. Capaian IKD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah per November 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Perekaman	Jumlah IKD	Capaian
1	Kota Magelang	100.057	33.280	33.26%
2	Temanggung	621.56	190.961	30.72%
3	Kota Surakarta	449.369	90.573	20.16%
4	Wonogiri	845.982	122.374	14.47%
5	Kebumen	1.087.228	113.176	10.41%
15	Boyolali	830.715	48.368	5.82%
16	Klaten	990.631	57.147	5.77%
17	Pemalang	1.169.644	60.152	5.14%
18	Magelang	1.022.696	52.371	5.12%
19	Kota Semarang	1.269.066	64.634	5.09%
20	Wonosobo	704.735	35.275	5.01%
27	Tegal	1.271.303	44.615	3.51%
28	Kota Salatiga	147.641	5.021	3.40%
29	Blora	714.716	23.779	3.33%
30	Kota Tegal	210.881	6.374	3.02%
31	Demak	898.483	22.818	2.54%
32	Brebes	1.505.350	33.004	2.19%
33	Pekalongan	750.58	16.408	2.19%
34	Sragen	771.353	15.475	2.01%
35	Reubang	504.053	7.280	1.44%

Sumber: Portal Resmi Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024

Disdukcapil Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya meningkatkan capaian IKD, seperti:

1. Program Jemput Bola “Anti Mager”

Aktivasi dan Informasi Masyarakat Gemar Registrasi atau Anti Mager diluncurkan pada 18 Juli 2024 oleh Disdukcapil Kota Semarang. Memiliki karakteristik tersendiri dengan melibatkan mahasiswa program Magang Merdeka dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan KKNT Universitas di Kota Semarang. Hadirnya inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan aktivasi IKD ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Semarang.

**Gambar 3. Peluncuran Inovasi “Anti Mager”**



Sumber: Portal Website Resmi Dispendukcapil Kota Semarang, 2024

2. Sosialisasi Melalui Forum Masyarakat  
Sosialisasi dalam kebijakan publik merupakan proses komunikasi dua arah

yang dinamis (Djoko Waluyo dan Syarifuddin, 2022). Disdukcapil Kota Semarang telah melaksanakan beberapa upaya sosialisasi IKD, salah satunya dengan pendekatan tatap muka seperti forum masyarakat yang dibarengi dengan sosialisasi e-pakem.

**Gambar 4. Sosialisasi IKD dan e-pakem di Kecamatan Gayamsari**



Sumber: Portal Website Resmi Disdukcapil Kota Semarang, 2024

3. Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan  
TPDK Kecamatan berperan sebagai pos layanan fungsional yang dihadirkan di kecamatan untuk melaksanakan aktivitas perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan, bukan bagian dari sub-unit organisasi yang formal.

**Gambar 5. Lokasi TPDK di Kecamatan Tembalang, Candisari, Pedurungan, Banyumanik Kota Semarang**



Sumber: Portal Website Resmi Disdukcapil Kota Semarang, 2025

#### 4. Loker IKD

Disdukcapil Kota Semarang juga mengambil upaya strategis dengan menyediakan loket khusus IKD di kantor Disdukcapil Kota Semarang yang diberi nama “IKD Corner”. Petugas yang melaksanakan layanan pada IKD Corner merupakan mahasiswa magang yang selinear dengan bidang keilmuan. Hal tersebut dilakukan sebagai respons terhadap keterbatasan jumlah pegawai akibat dampak dari efisiensi.

**Gambar 6. Sudut IKD Corner di Disdukcapil Kota Semarang**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Beberapa upaya yang telah dirancang oleh Disdukcapil Kota Semarang termasuk upaya inovatif dan proaktif untuk meningkatkan capaian IKD. Disdukcapil Kota Semarang masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan, pengetahuan dan sarana pendukung, terlebih karna advokasi yang masih kurang optimal sehingga capaian IKD di Kota Semarang hingga saat ini masih tergolong rendah (Kinanti, 2024).

Penelitian ini akan menganalisis lingkungan internal dan eksternal di Disdukcapil Kota Semarang untuk merumuskan bagaimana strategi yang dapat diinterpretasikan menjadi tindakan nyata guna membantu meningkatkan capaian IKD.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Manajemen Strategis

Menurut Mintzberg (1994), manajemen strategis sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi, tidak hanya merupakan hasil dari perencanaan formal, tetapi juga dapat muncul dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan.

Poister (2010) berargumen bahwa manajemen strategis mencakup (a) perencanaan strategis; (b) penganggaran, pengukuran kinerja,

manajemen, dan evaluasi; dan (c) umpan balik antara elemen-elemen tersebut untuk meningkatkan pencapaian misi, mandat, dan penciptaan nilai publik yang berkelanjutan melalui pembelajaran strategis.

## 2. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan sebuah dasar bagi manajemen strategis, tetapi cakupan manajemen strategis jauh lebih luas (Bryson & George, 2020). Menurut Bryson (1995), perencanaan strategis adalah disiplin yang bertujuan menghasilkan keputusan dan tindakan penting yang membantu organisasi untuk memahami dirinya sendiri. Bryson menyebut bahwa dalam proses perencanaan strategis, terdapat delapan tahapan:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
2. Mengidentifikasi mandat organisasi
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi
4. Analisis Lingkungan Internal
5. Analisis Lingkungan Eksternal
6. Mengidentifikasi Isu Strategis Yang Dihadapi Organisasi
7. Merumuskan Strategi Untuk Mengelola Isu-Isu
8. Menciptakan Visi Organisasi Yang Efektif Untuk Masa Depan

## 3. Analisis SWOT

Analisis SWOT sebagai pendekatan bagi sebuah organisasi yang dilakukan untuk dapat meneliti lingkungan eksternal an internal, analisis SWOT nantinya dapat menentukan strategi yang lebih tepat dan optimal kedepannya (Kotler, 2009).

**Tabel 2. Tabel Matriks SWOT**

INTERNAL FACTORS (IFAS)	Strengths (S)	Weaknesses (W)
EXTERNAL FACTORS (EFAS)	Strategi SO Strategi yang disusun untuk memanfaatkan kekuatan yang ada dalam upaya meraih peluang	Strategi WO Strategi yang disusun untuk menutupi atau mengurangi kelemahan yang ada dalam upaya meraih peluang
Threats (T)	Strategi ST Strategi yang disusun untuk memanfaatkan kekuatan yang ada dalam upaya menghadapi ancaman	Strategi WT Strategi yang disusun untuk menutupi atau mengurangi kelemahan yang ada dalam upaya menghadapi ancaman

Sumber: Freddy Rangkutin (2014)

Menurut Rangkutin (2014), penjelasan masing strategi dikembangkan dengan menggunakan matriks SWOT dan dikelompokkan dalam empat jenis utama sebagai berikut:

- Strategi S-O (*Strengths-Opportunities*), mengidentifikasi pemanfaatan kekuatan internal untuk mengejar peluang eksternal
- Strategi S-T (*Strengths-Threats*), mengeksplorasi kekuatan internal digunakan untuk mengatasi atau mengurangi ancaman eksternal
- Strategi W-O (*Weakness-Opportunities*), fokus pada kemampuan dalam mengatasi

kelemahan internal agar dapat memanfaatkan peluang eksternal

- Strategi W-T (*Weakness-Threats*), melihat strategi untuk mengatasi kelemahan internal dalam menghadapi ancaman dari luar.

#### 4. Uji Litmus

Bryson (2007) menjelaskan bahwa setelah isu-isu strategis diidentifikasi dan alternatif strategi dirumuskan, penting untuk menguji kelayakan dan kesesuaian strategi-strategi tersebut. Uji litmus berfungsi untuk memverifikasi sejauh mana suatu strategi dapat diterima atau diterapkan dalam konteks tertentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi hasilnya.

Penilaian skor uji litmus diberikan sebagai berikut:

- Skor 1 = isu yang bersifat operasional
- Skor 2 = isu yang cukup strategis.
- Skor 3 = isu yang sangat strategis

**Tabel 3. Tabel Uji Litmus**

No	Pertanyaan	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3
1	Kapan tantangan atau peluang isu strategis tersebut dihadapi?	Sekarang	Tahun Depan	Dua Tahun atau Lebih
2	Seberapa luas pengaruh suatu isu terhadap departemen?	Unit/Divisi Tunggal	Beberapa Divisi	Seluruh Departemen
3	Seberapa besar risiko peluang keuangan organisasi?	Kecil ( $\leq 10\%$ dari anggaran)	Sedang ( $10\% - 25\%$ dari anggaran)	Besar ( $> 25\%$ dari anggaran)
4	Apakah strategi bagi penyelesaian isu memerlukan: a. Pengembangan sasaran baru? b. Perubahan signifikan? c. Modifikasi fasilitas? d. Penambahan staff?	Tidak	Ya	
5	Bagaimana pendekatan terbaik bagi penyelesaian isu?	Jelas, siap diimplementasikan	Parameter luas, agak terperinci	Terbuka luas
6	Tingkat manajemen manakah yang dapat menetapkan cara menyelesaikan isu?	Pengawasan staf/ini	Kepala Divisi	Kepala Departemen
7	Apakah konsekuensi jika isu tidak ditangani?	Ada gangguan, inefisien	Kekacauan pelayanan	Biaya besar, penghapusan sumber
8	Seberapa banyak departemen lain yang terpengaruh dan dilibatkan dalam pemecahan isu?	Tidak ada	Satu sampai tiga	Empat atau lebih
9	Bagaimana sensitivitas isu ini terhadap nilai sosial, politik, religius, dan budaya?	Lunak	Sedang	Keras

Sumber: Bryson (2005)

Setelah setiap isu dinilai dengan skor yang sesuai, jumlah skor yang dihasilkan dari penilaian terhadap beberapa pertanyaan akan dihitung untuk memperoleh total skor. Total skor ini kemudian digunakan untuk mengategorikan isu dalam tingkat strategisnya.

- Jika total skor berada di antara 1-13, isu dianggap operasional
- Jika total skor berada di antara 14-26, isu dianggap moderat
- Jika total skor berada di antara 27-39, isu dianggap strategis

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Disdukcapil Kota Semarang dalam meningkatkan capaian IKD. Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan strategi. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, analisis SWOT dan uji litmus serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal di Disdukcapil Kota Semarang mencakup beberapa aspek penting seperti visi dan misi, sumber daya manusia, sumber dana, dan infrastruktur.

#### 1. Visi dan Misi

Visi dan misi menjadi pedoman normatif dalam meningkatkan capaian IKD, dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra 2021–2026.

**Gambar 7. Visi dan Misi Kota Semarang tahun 2021-2025**



Sumber: Portal Website Resmi Disdukcapil Kota Semarang, 2025

Disdukcapil Kota Semarang berpedoman pada misi yang ke 5 poin ke 2. Keselarasan ini menegaskan bahwa program IKD mendukung misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dalam melanjutkan langkah strategisnya,

Disdukcapil Kota Semarang merumuskan berbagai isu penting seperti yang tertera dalam Renja Disdukcapil tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di setiap Kelurahan yang terintegrasi dengan sistem pelaporan akta kematian Disdukcapil.
2. Belum optimalnya capaian penggunaan IKD oleh masyarakat.
3. Perlunya peningkatan budaya kerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang berintegrasi, bebas pungli dan berorientasi pelayanan prima.

Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi tantangan berupa beban kerja ganda yaitu kewajiban mencapai target nasional IKD dan pengelolaan inovasi lokal. Strategi sosialisasi IKD pun tidak dijalankan secara khusus, melainkan hanya disisipkan dalam program lain sehingga informasi tidak tersebar merata dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.



dengan kebijakan yang menjadi isu strategis.

#### 4. Infrastruktur

Kondisi infrastruktur di Disdukcapil Kota Semarang dalam mendukung strategi tergolong optimal dan bersifat inovatif seperti perangkat untuk aktivasi di kantor pusat, perluasan lokasi, hadirnya loket IKD, penyediaan wifi, dan armada jemput bola. Masih terdapat hambatan signifikan yang menunjukkan adanya *infrastructure gap* antara kesiapan fasilitas dan kebutuhan teknis lapangan.

Hal ini dibuktikan dengan penggunaan sistem SIAK sering mengalami *error* dan tidak kompatibel dengan perangkat yang digunakan maupun masyarakat. Kompatibilitas seharusnya menjadi perhatian utama dalam perencanaan digitalisasi yang berkelanjutan.

#### B. Analisis Lingkungan Eksternal

Untuk membantu mengenali kondisi eksternal yang relevan, penelitian ini melihat aspek keterlibatan stakeholder, partisipasi masyarakat, dan kebijakan pemerintah dalam analisis lingkungan eksternal.

##### 1. Keterlibatan Stakeholder

Disdukcapil Kota Semarang melibatkan berbagai pihak seperti OPD

kecamatan, kelurahan, mahasiswa magang MSIB, dan peserta KKN tematik. Namun, sifat partisipasi stakeholder yang masih dominan informatif dan instruksional, bukan kolaboratif. Selain itu, tidak adanya mekanisme evaluasi kinerja atau umpan balik yang terstruktur membuat pelaksanaan strategi bergantung pada inisiatif masing-masing pihak di lapangan.

Tidak hanya itu, IKD belum diadopsi secara luas dalam layanan publik seperti perbankan, rumah sakit, atau transportasi. Akibatnya, masyarakat belum merasakan nilai tambah dari penggunaan IKD dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini memunculkan bentuk resistensi pasif dari masyarakat. Strategi yang dirancang menjadi rentan terhadap inkonsistensi jika tidak segera disesuaikan dengan kebutuhan serta dinamika sosial.

##### 2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dilakukan untuk melihat dukungan masyarakat terhadap hadirnya kebijakan sekaligus untuk menjalankan tugas monitoring dan evaluasi. Meskipun kanal pengaduan seperti media sosial dan platform seperti *Lapor Semar* tersedia, penggunaan kanal tersebut cenderung bersifat reaktif.

Banyak warga belum merasakan manfaat konkret dari penggunaan IKD

karena rendahnya integrasi layanan lintas sektor, hambatan teknis, kurangnya sosialisasi, dan isu keamanan data. Akibatnya, mereka tidak memiliki dasar yang cukup untuk memberikan umpan balik secara relevan.

Ketidakhadiran masyarakat dalam proses ini menciptakan *blind spot* dalam penilaian strategi, mengakibatkan efektivitas program tidak sepenuhnya bisa diukur karena tidak mencerminkan pengalaman dan kebutuhan pengguna secara nyata.

### 3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pusat, seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, telah menetapkan standar teknis dan target capaian aktivasi IKD. Namun, implementasinya di Kota Semarang belum sepenuhnya ditopang oleh instrumen hukum dan sumber daya yang memadai.

Hal ini disebabkan lemahnya posisi kebijakan di mata publik karena bersifat tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung. Kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan data pribadi juga belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan melalui kebijakan teknis yang transparan.

## C. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Identifikasi faktor internal dan eksternal menjadi langkah awal yang krusial untuk memahami kondisi menyeluruh suatu organisasi atau program.

**Tabel 4. Hasil Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal**

Penilaian Lingkungan		S	W	O	T
<b>Lingkungan Internal</b>					
<b>Visi dan Misi</b>					
Keselarasan visi dan misi Dsuhkacapi dengan Rencana dan RPJMD Kota Semarang	✓				
Isu strategi IKD menjadi perhatian utama dalam Rencana Dsuhkacapi tahun 2022	✓				
Sosialisasi IKD tidak dirancang secara khusus, melainkan disisipkan dalam kegiatan pelayanan umum yang menyebabkan informasi tidak terarah			✓		
Beban kerja ganda Dsuhkacapi dalam menjalankan strategi IKD sebagai target pusat dan inovasi pelayanan lokal			✓		
<b>Sumber Daya Manusia</b>					
Keterbatasan jumlah pegawai akibat efisiensi			✓		
Peningkatan tugas aktivasi IKD kepada petugas kebumihuran yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 serta peblatihan mahasiswa magang (MSIB) dan KKN Tematik sebagai pendukung operasional	✓				
Pemipkatan kapasitas SDM internal terbatas waktu dan tidak berkelanjutan			✓		
Pemipkatan kapasitas SDM eksternal hanya di awal dan tidak berkelanjutan			✓		
Komunikasi untuk monitoring dan evaluasi melalui grup WhatsApp	✓				
<b>Sumber Dana</b>					
Anggaran dialokasikan untuk umum dan tidak dimunculkan spesifikasi untuk mendukung pelaksanaan strategi peningkatan kapasitas IKD			✓		
<b>Infrastruktur</b>					
Infrastruktur sebagai fasilitas pendukung yang termasuk seperti IKD Cosnar, Wi-Fi, TPDK kecamatan, perluasan aktivasi hingga kecamatan, penggunaan media sosial, armada tempur bola	✓				
Software SIAR yang sering error dan tidak kompatibel dengan banyak perangkat			✓		
"Aan Mager" tidak difasilitasi perangkat untuk aktivasi IKD di lapangan			✓		
<b>Lingkungan Eksternal</b>					
<b>Keterlibatan Stakeholder</b>					
Mengundang RT/RW, bebarukan, kecamatan, mahasiswa magang, dan lembaga pendidikan (UNTAO) sebagai stakeholder yang minim kontrol lapangan dan bealala					✓
Absennya sektor swasta (perbankan, rumah sakit, transportasi) sebagai mitra strategis dalam mendukung manfaat IKD					✓
<b>Partisipasi Masyarakat</b>					
Proses monitoring dan evaluasi IKD masih bersifat internal dan belum melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat secara langsung					✓
Karakteristik masyarakat yang berbeda-beda					✓
<b>Kebijakan Pemerintah</b>					
Adanya target capaian aktivasi IKD yang ditetapkan dalam peraturan Kementerian					✓
Kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi belum dapat dipertanggungjawabkan melalui kebijakan teknis yang transparan					✓
Tidak ada instrumen yang mengatur integrasi IKD dalam pelayanan lintas sektor					✓

Sumber: Data diolah, 2025

## D. Analisis SWOT

Setelah faktor-faktor dari lingkungan internal dan eksternal berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya melakukan analisis SWOT untuk memahami keterkaitan antar unsur secara lebih mendalam.

**Tabel 5. Hasil Analisis Matriks Analisis SWOT**

INTERNAL	<b>Kekuatan (S):</b> 1. Keseluruhan visi dan misi Disdukcapil dengan Renstra dan RPJMD Kota Semarang 2. IKD menjadi isu strategis dalam Raja Disdukcapil tahun 2025 3. Pelaksanaan tugas aktivasi IKD dan pelatihan MSIB dan KICNT sebagai peningkatan operasional 4. Fasilitas yang memadai.	<b>Kelurahan (W):</b> 1. Sosialisasi IKD tidak dimatang secara khusus dan luas 2. Belum kerja ganda 3. Keterbatasan jumlah pegawai akibat efisiensi 4. Peningkatan kapasitas SDM internal terbatas waktu dan tidak terstruktur 5. Peningkatan kapasitas SDM tidak berkelanjutan 6. Komunikasi untuk monitoring dan evaluasi melalui grup WhatsApp Tidak ada suggestion spesifik untuk IKD 7. Software SLAF yang sering error dan tidak kompatibel dengan banyak perangkat 8. "Lain Slagor" tidak difasilitasi perangkat untuk aktivasi IKD di lapangan
	<b>Pelemahan (O):</b> 1. Adanya target capaian aktivasi IKD yang ditetapkan dalam peraturan Kesendagri	<b>Strategi S-O</b> 1. Menyusun SOP aktivasi lintas sektor berdasarkan Renstra dan RPJMD (S3-O1) 2. Menyediakan booth IKD Corner bergerak dilengkapi fasilitas di lokasi-lokasi strategis sesuai target sasaran seperti sekolah, rumah sakit, atau CFD (S4-O1) 3. Mendesain Gerakan Aktifasi IKD Massal secara berkala di setiap kabupaten menggandeng stakeholder yang ada (S3-O1)
EKSTERNAL	<b>Strategi S-T</b> 1. Mengadakan forum "Ngopi Bareng Dukacapi" (Ngopi Pinter Bareng Dukacapi) atau memanfaatkan platform pengabdian dan bantuan Disdukcapil yang ada untuk membuka ruang diskusi sebagai langkah dengan masyarakat (S4-T4) 2. Membangun kolaborasi formal dengan instansi terkait melalui MoU (S3-T1) 3. Memanfaatkan media sosial resmi untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang seru dan kreatif terkait kesamaan dan (S4-T5)	<b>Strategi W-T</b> 1. Mengembangkan sistem <i>webinar</i> dan survei kepuasan masyarakat yang terintegrasi melalui aplikasi atau <i>website</i> Disdukcapil untuk mendapatkan data partisipasi dan pengalaman penggunaan IKD secara langsung (W4-T1) 2. Melakukan <i>audience</i> dan <i>advokasi</i> kepada pemangku pusat dan instansi terkait untuk mendorong regulasi dan kerja sama dalam integrasi IKD lintas sektor (W5-T6) 3. Penyelenggaraan "Pionir IKD" dengan memanfaatkan figur-figur muda yang populer dan memiliki jangkauan luas di kalangan masyarakat untuk menyebarkan informasi, mendorong aktivasi IKD, dan mengumpulkan masukan dan <i>warga</i> (W3-T5)

Sumber: Data diolah, 2025

**E. Evaluasi Isu Strategis**

Evaluasi isu strategis bertujuan menilai tingkat urgensi dan dampak dari setiap isu terhadap pencapaian tujuan organisasi. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam tahap ini adalah uji litmus.

**Tabel 6. Hasil Tes Litmus pada Isu Strategis**

No.	Pertanyaan	Isu Strategis													
		S2	S4	S3	W1	W5	W2	S4	S4	W6	W5	W3			
1.	Kapan <i>strategi</i> politik isu tersebut mampu dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang?	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	
2.	Seberapa luas <i>persepsi</i> isu tersebut terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang?	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	
3.	Seberapa besar <i>realisasi</i> peluang kesempatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang?	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1	3	2	2	
4.	Apakah <i>strategi</i> bagi pemecah isu menyebabkan: 1. Pengembangan sistem dan program <i>kegiatan</i> baru? 2. Perubahan signifikan terhadap <i>perilaku</i> perundang-undangan? 3. Perubahan terhadap <i>fasilitas</i> dan <i>tenaga</i> kerja? 4. Perubahan <i>struktur</i> ?	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3
5.	Bagaimana <i>pelaksanaan</i> terhadap bagi pemecah isu?	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	
6.	Tingkat <i>manajemen</i> yang <i>kuat</i> untuk <i>meningkatkan</i> ini?	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	
7.	Kemungkinan <i>yang</i> <i>terjadi</i> bila <i>isu</i> tidak <i>diselesaikan</i> ?	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	
8.	Seberapa <i>banyak</i> <i>dinas</i> lain <i>terpengaruh</i> dan <i>dibutuhkan</i> dalam <i>pemecahan</i> ini?	2	2	3	2	2	2	2	3	2	1	3	2	2	
9.	Bagaimana <i>isu</i> mempengaruhi <i>nilai</i> sosial, <i>politik</i> , <i>religius</i> , dan <i>kultural</i> ?	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	
	Jumlah Skor	24	32	30	30	20	26	32	32	33	20	34	30		

Sumber: Data diolah, 2025

**F. Perumusan Program-Program Startegis**

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, strategi yang bersifat strategis dan dapat diterapkan oleh Disdukcapil Kota Semarang dalam upaya meningkatkan capaian IKD adalah sebagai berikut:

- Melakukan audiensi dan advokasi ke pemerintah pusat dan instansi terkait untuk mendorong integrasi IKD lintas sektor.
- Membangun kolaborasi formal dengan instansi terkait melalui MoU.
- Menyediakan *booth* IKD Corner bergerak dilengkapi fasilitas di lokasi-lokasi strategis sesuai target sasaran. Mendesain gerakan aktivasi IKD secara berkala menggandeng stakeholder terkait.
- Mengadirkan "Pionir IKD" dengan memanfaatkan figur-figur yang memiliki jangkauan luas di kalangan masyarakat untuk menyebarkan informasi dan mengumpulkan *feedback*.
- Memperluas lokasi jemput bola terutama kawasan yang jauh dari jangkauan Disdukcapil.
- Membuat tim sosialisasi IKD khusus yang sistematis dan terfokus.
- Menyusun SOP aktivasi lintas sektor berdasarkan Renstra dan RPJMD.

8. Memanfaatkan media sosial resmi untuk menyasar segmen-segmen masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang sesuai dan kreatif.
9. Mengadakan forum diskusi atau memanfaatkan platform pengaduan dan *helpdesk* Disdukcapil untuk membuka ruang diskusi langsung dengan masyarakat.
10. Pelatihan khusus berbasis modul Kemendagri agar pendampingan lebih sistematis dan sejalan dengan target nasional kepada stakeholder terkait.
11. Mengembangkan sistem *feedback* dan survei kepuasan masyarakat yang terintegrasi melalui aplikasi atau *website* resmi.

## KESIMPULAN

Strategi peningkatan capaian IKD di Disdukcapil Kota Semarang menunjukkan adanya potensi kelembagaan yang progresif melalui infrastruktur pelayanan, inovasi digital, dan kemitraan aktif. Namun, masih dibatasi oleh kelemahan internal seperti ketiadaan SOP baku, keterbatasan SDM, dan belum optimalnya integrasi sistem layanan. Di sisi eksternal, tantangan berupa rendahnya literasi digital, resistensi masyarakat, serta absennya regulasi nasional yang bersifat mengikat menjadi hambatan signifikan terhadap adopsi IKD secara luas dan berkelanjutan.

Meskipun upaya telah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas oleh pendekatan insidental dan belum menyentuh aspek perubahan perilaku publik. Melalui analisis SWOT dan uji litmus, disimpulkan bahwa strategi paling relevan adalah advokasi regulasi nasional yang mengikat dan integratif, guna menjembatani kesenjangan struktural dan sosial serta memperkuat legitimasi transformasi digital layanan kependudukan di Kota Semarang.

## SARAN

Melalui analisis SWOT dan uji litmus, saran yang dapat diberikan dengan mengadopsi tiga pendekatan utama yang bersifat integratif dan transformatif dengan mendorong lahirnya regulasi nasional yang mengikat sebagai landasan hukum pemanfaatan IKD secara menyeluruh, membangun forum koordinasi kolaboratif dan komprehensif, serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. F. (2024). Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Arief, I. M., & Arsyad, R. (2024). *Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, Perlindungan Masyarakat).

- Armia, S., & Hertati, D. (2023). Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Rungkut Kidul Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis Digital. *Jurnal Dedikasi*, 3(1), 81-90.
- Attohiro, N. F. (2025). Strategi Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Skripsi, Universitas Diponegoro). Institutional Repository Universitas Diponegoro.
- Azizah, N., Nastia, N., & Sadat, A. (2022). Strategi dinas kesehatan dalam menekan laju penderita stunting di kabupaten buton selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4145-4152.
- Azmira, R. T., & Nurcahyanto, H. (2024). Strategi Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Terasering Sittenggong Di Dusun Nampan Desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 264-281.
- Baihakhi, M. A. (2024). *Strategi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam mengatasi Mmsalah kebakaran pada pemukiman padat penduduk di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Bakri, R. M. S., Haliah, H., Nirwana, N., & Oemar, M. A. F. I. (2022). Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(2), 1-10.
- Baptista, A. S., & Suraji, S. (2024). *Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Benjamin, M., Pati, A., & Singkoh, F. (2017). Strategi Dinas Pendidikan Dalam Meminimalisir Anak Putus Sekolah Di Kota Bitung. *Jurnal eksekutif*. 1(1).
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement* (5th ed.). Wiley.
- Chasanah, L., Rostyaningsih, D., & Astuti, R. S. (2024). Strategi Recovery Pengembangan Desa Wisata Kandri Di Kecamatan Gunungpati Pasca Pandemi Covid-19. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 842-851.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Darwis, F., Lating, A., & Pora, R. (2024). Strategi Dinas Kepentudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan Di Kota Ternate. *Journal Of Ethnic Diversity And Local Wisdom*, 5(2), 34-51.
- Damayanti, I. (2022). Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1).
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 4(1), 15-27. Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Padjadjaran.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2025). Rencana Strategis 2021-2026.
- Faridha, N. R. I., & Djumiarti, T. (2024). Strategi Pengelolaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-12.
- Fitriana, D., & Arif, M. (2024). Implementasi Smart Governance Dalam Pelayanan Disdukcapil Berbasis Digital. *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan*, 7(2), 78-90.
- Gatiningsih, R., & Sutrisno, A. (2024). Strategi pelayanan inovatif Disdukcapil dalam percepatan aktivasi IKD di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 110-125.

- Ginting, N. D. C., Subowo, A., & Yuniningsih, T. (2024). Strategi Pengembangan Taman Rekreasi Pantai (Trp) Kartini Guna Melestarikan Wisata Lokal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 187-205.
- Herdiyono, W. F., Marsudi, & Nugroho, R. A. (2021). Perencanaan Strategi Pengembangan Potensi Desa Cemoro Sebagai Desa Wisata Berbasis Masyarakat dan Budaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsiAN)*, 9(2), 279-289.
- La Tarifu. (2020). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari. *Jurnal Publicuho*, 3(2), 233–246.
- Maghfiroh, A. F. (2021). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam Mendukung Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA). (Skripsi, Universitas Tidar).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Mubarokah, Z., Priyadi, B. P., & Dwimawanti, I. H. (2024). Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Tretes Kec. Wonosalam, Kab. Jombang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 701-7017.
- Mulyani, S. (2020). Strategi Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Terasering Sitenggong dengan Pendekatan Teori Bryson. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 8(2), 123-135.
- Nova Mistika, A. (2023). *Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Nur, T., Amal, I., Zelin, A., Pangestu, G., & Malis, A. (2024). Strategi Disdukcapil dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Sukabumi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 320-335.
- Paramasari, D. A. (2009). Strategi Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Surakarta Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm).
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2008). *Strategic management: Formulation, implementation, and control* (12th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Pongantung, M. C., Dengo, S., & Mambo, R. (2021). Manajemen strategis pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103).
- Prakoso, C. T. (2023). Inovasi layanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perspektif digital government. *Jurnal Paradigma*, 12(2), 45–58.
- Prasetyo, A. (2020). Strategi dinas perumahan dan kawasan permukiman dengan pendekatan teori Bryson. *Jurnal Manajemen Universitas Tidar*, 6(1), 45-58.
- Purhayani, A. S. (2019). *Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Rahmayani, I., Ningreum, S., & Sukarno, D. (2021). Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis dalam Pengembangan Pariwisata. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 69-74.
- Ramadhanti, A. L. A., Larasati, E., & Lituhayu, D. (2023). Strategi Pengembangan Umkm Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 166-177.
- Ratnasari, L. (2024). Strategi jemput bola Disdukcapil dalam meningkatkan aktivasi IKD di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 45-58.
- Safitri, E. (2023). Strategi peningkatan cakupan IKD di Kabupaten Sleman [Skripsi, Universitas Sebelas Maret].
- Santoso, B. (2020). Pengaruh Strategi Adaptif Terhadap Kinerja Organisasi Di Sektor Manufaktur. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15(2), 123-135
- Soemartono, A. dan Hendrastuti, T. (2011). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Administrasi Pendudukan. *Jurnal Kreativitas dan Inovasi*, 1(1), 160-167.
- Sinollah, M. (2020). Pengukuran Kualitas Pelayanan (Servqual – Parasuraman) pada Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(1), 50-60.
- Susanti, H., & Norsyafa'ah. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat Tentang Kepemilikan Akta Kematian (Studi Kasus Di Desa Bincau Kecamatan Martapura Kota). *Scientific: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 1–15.
- Terry, George R; Rue, Leslie W; Ticoalu, G.A. (2005). *Dasardasar manajemen / George R. Terry, Leslie W. Rue; penerjemah, G.A. Ticoalu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Wempie, M. A. R., Susanti, E., & Indriani, S. (2024). Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 40-49.
- Wijaya, K. F., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang Dalam Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 547-561.
- Wirayudha, S. (2024). Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Dalam Penerapan Aplikasi Kartu Tanda Penduduk Dikecamatan Sail. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 624-628.
- Wulansari, A., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Strategi dinas koperasi dan umkm kabupaten karawang dalam pemberdayaan umkm. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1).